



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 27 Mei 2024

Nomor : 963/ 635 /V/BKAD/2024
Sifat : Segera
Perihal : Permintaan Data Lampiran Evaluasi Ranperda dan Ranperbup
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

di Tempat

Dalam rangka pemenuhan data Lampiran Evaluasi Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, maka diminta untuk melengkapi data sebagai berikut:

1. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri (DISPERINDAGKOPUKM);
2. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah (BAPPEDALITBANG);
3. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota (BAPPEDALITBANG);
4. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting* (DPMD, DP3AP2KB, DINSOS, DINKES);
5. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (BAPPEDALITBANG).

Adapun data di atas diharapkan dapat kami terima berupa *soft file* yang dikirimkan melalui email akuntansibkadbobar@gmail.com sebagaimana format terlampir **paling lambat 10 Juni 2024**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:



SEKRETARIS DAERAH

RODY ISKANDAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... *)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
I	BELANJA OPERASI					
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)					
I.2	Belanja Hibah Barang /Jasa					
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa					
II	BELANJA MODAL					
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
	Total (1+2)					

*) : Diisi dengan nama pemerintah daerah

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TA 2023

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)

*) : Diisi dengan nama pemerintah daerah

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA..... *)
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
2023

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)

*) : Diisi untuk Kabupaten/Kota

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN *STUNTING* TA 2023

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan <i>stunting</i>				
	1	Peningkatan skrining anemia remaja putri			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	2	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	3	Pemeriksaan kehamilan (<i>Antenatal Care</i>)			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			

		Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	4	Konsumsi TTD ibu hamil			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	5	Pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK)			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	6	Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	7	pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan			
		Belanja Operasi			

		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	8	pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun (baduta)			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	9	Tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (<i>weight flatteing, wasting, dan stunting</i>)			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	10	Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			

		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	11	Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita			
		Belanja Operasi			
		Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
	Dst	Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
2.		Total Belanja <i>Stunting</i>			

*) : Diisi dengan nama pemerintah daerah

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA *)

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TA 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota			
	1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
	Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			

	2	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	3	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi			

		Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.	Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan				
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi			

		Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
3.	Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>)				

	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
		Belanja Operasi			

		Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
4.	Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat				
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
5.	Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali				
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa			

		Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Dst.			
		Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			

Keterangan:

Seluruh kolom anggaran dan realisasi pada jenis belanja diisi bila ada

*) : Diisi dengan nama pemerintah daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SEKRETARIS DAERAH

RODY ISKANDAR

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

